



PUTUSAN
Nomor 272 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BAHRAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lombok, Nomor 17, RT 004/RW 003, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Mochammad Ramdhan, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Pasundan Law Firm, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Ambon, Nomor 1B, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dendi Hermansyah, S.E., M.Ap., jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KB.01.06/1896-Disdukcapil/2022, tanggal 7 Juni 2022;

II.1. LUCIA ELVI INGGRANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jati Asih Blok D 6, Nomor 1, RT 002, RW 007, Kelurahan Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2023



2. BELLA BAHRAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cidada Girang, Nomor 40, RT 003, RW 005, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidada, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa Hendar Syah Amrullah, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan dan Perumahan Indonesia (LBHPPI), beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 tanggal 28 Oktober 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya II Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama Bella Bahram, lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16905/1999 tanggal 28 Oktober 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya II Bandung sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama Bella Bahram, lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Bella Bahram lahir di Bandung pada tanggal 23 Oktober

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, dengan mengubah pernyataan terkait Bella Bahram merupakan anak dari pasangan suami istri Bahram (Penggugat) dengan Lucia Elvi Inggriani menjadi pernyataan jika Bella Bahram merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Lucia Elvi Inggriani;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu (daluwarsa) untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 27 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 315/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dapat diterima seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2022/PTUN.BDG tertanggal 27 Oktober 2022;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 315/B/2022/PT.TUN.JKT tertanggal 10 Februari 2023;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi II semula Tergugat II Intervensi 1, 2 untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia/ *Judex Juris* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dengan ini memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 4 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Akta Kelahiran merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sebagai rangkaian dari adanya Akta Nikah/Perkawinan yang substansi permasalahan hukumnya mengenai keabsahan perkawinan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama bagi yang beragama Islam, atau Peradilan Umum bagi yang beragama selain Islam;
- Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan bagi anak serta menghindari adanya putusan mengenai Akta Kelahiran yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan tentang keabsahan perkawinan, maka terhadap sengketa *a quo* berlaku teori melebur

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2023



(*oplossing theory*) sehingga Akta Kelahiran dianggap melebur ke dalam perbuatan hukum perkawinan yang secara administratif dituangkan dalam Akta Nikah/Perkawinan;

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAHRAM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 272 K/TUN/2023

